TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Yunanto Bayuaji

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: yunantabayuaji@gmail.com

Abstrak

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini di arahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Temuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengisi kekosongan wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kata Kunci: *Pemerintah daerah, Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Hukum.*

Abstract

In government affairs, the government delegates part of the affairs to the government apparatus or regional government representatives. The regional government consists of the regional head and deputy regional head as the highest government holders in the area and as part of the State administration. This research is a normative juridical research, therefore this theory is in the discussion that is typical of legal science. The theory of this research is to provide a solid foundation, in each study must discuss the analysis relating to the analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently. The findings of this study are important which help the deputy regional head vacancies to help regional heads carry out their duties and functions. This is because the Ministry of Home Affairs has not confirmed in a legal product, the filling of regional representative positions is carried out in accordance with the provisions of the legislation concerning the election of regional heads Article 17 of Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors.

Keywords: *Local government, Position Deputy Regional Head, Law.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Sehingga dengan demikian Negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk Republik Kesatuan (Nurcholis, 2007:100).

Negara Indonesia diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan mempunyai kekuasaan yang tidak dibatasi, kekuasaan pemerintah pusat bisa menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa (Siswanto, 2006:35).

Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Asshiddiqie, 2009:323).

Mengenai pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Daerah-daerah provinsi dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota. Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan

pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan (Asshiddiqie, 2003:1).

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki totaliter yang luas untuk menyampaikan persepsinya masing-masing, sekaligus membuat strategi yang terencana untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, desentralisasi harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas harus dilaksanakan secara integral dan terpadu sebagai subsistem pemerintahan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terkait Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat totaliter Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah yang Kosong Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan terdiri dari 3 (tiga) hal ketatanegaraan dikenal jenis pelimpahan wewenang yaitu (1) Atribusi, (2) Delegasi dan (3) Mandat. Atribusi Dalam Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia dikatakan atribusi (*attributie*) bermakna pembagian (kekuasaan), seperti kata *attribute van rechtsmacht* mengandung arti pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kewenangan mutlak lawan dari *distributie van rechtsmacht*) (Algra, 1983:38).

Substansi atribusi adalah menciptakan suatu istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*authority of theory*” (dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritat*”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HR, menyatakan pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.” (Salim, 2013:183).

Menurut Ridwan (2006:107), ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan tersebut adalah adanya “aturan hukum” dan “sifat hubungan hukum. Menurut

Philipus M. Hadjon, Pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus bersifat definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (Penjelasan). Artinya delegasi berwewang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.

Sedangkan Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang (beberapa orang) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kehendaknya dan dipertanggung jawabkan.

2. Kerangka Konseptual

Demi memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran yang berbeda antara satu konsep dengan konsep lainnya maka digunakanlah kerangka konsep. Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari Undang-Undang. Namun, penggunaan Undang-Undang dimungkinkan apabila konsep sudah ada di dalamnya (Simatupang, 2008:16).

Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan Undang-Undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dikarenakan penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti (Syahrin, 2010:3).

Dalam menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Independen
Pengertian Independen dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, bebas. Secara sederhana pengertian calon independen yang dimaksud di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan Partai Politik sebagai media perjuangannya.
- f. Implementasi adalah Pelaksanaan; Penerapan Bentuk Kata Kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.
- g. Partai Politik suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedaulatan politik.
- h. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya

dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

- i. Pengisian Kekosongan Jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh seseorang yang tepat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi/ perusahaan/ instansi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga sasaran nya dapat tercapai.
- j. Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidaknya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan (Rahardjo, 1986:106). Sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), untuk mencari kebenaran koherensi. Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan negara mengingat kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan mekanisme pemerintahan, dimana aktualisasi pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Munculnya pemerintahan

demokratis dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki mekanisme pemerintahan yang sebelumnya diwarnai dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak rakyat, mendahulukan kepentingan sebagian kecil orang, menempatkan kepentingan pribadi sebagai titik tolak pelaksanaan pemerintahan dan tindakan-tindakan lainnya.

Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Asshiddiqie, 2009:323).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pun terus berkembang di berbagai aspek, namun demikian ada salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan diantara kalangan ahli hukum, yakni kedudukan wakil Gubernur/Walikota/Bupati yang selanjutnya disebut sebagai wakil kepala daerah. Merujuk pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan adanya jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota tetapi tidak menentukan jabatan wakil kepala daerah. Di Pasal lain justru menentukan secara eksplisit adanya jabatan Wakil Presiden yaitu “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peran penting. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kepala daerah sebagai daerah yang otonom memiliki peran yang menentukan dalam pemerintah daerah. Kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan daerah berdasarkan prakarsa masing-masing daerah. Bisa dikatakan, keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh kepala daerah yang memimpin. Untuk itulah, diperlukan kepala daerah yang berkualitas. Namun, dalam melaksanakan kewajibannya, kepala daerah juga harus dibantu oleh wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa

jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Keberadaan seorang wakil kepala daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang kepala daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa (Saputra, 2017:1).

Seandainya pun kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah. Pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami proses yang sangat panjang, berbelit-belit dan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga hal ini akan berakibat pemerintahan berjalan secara tidak efektif, yang tentunya hal ini sangat merugikan warga masing-masing daerah.

Mekanisme pengisian wakil kepala daerah telah diatur dan diakomodir dalam Undang-Undang. Adapun wakil kepala daerah yang berhenti, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Pengisian jabatan wakil kepala daerah seharusnya diisi karna akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada prakteknya terdapat kasus dimana jabatan wakil gubernur tidak diisi dalam waktu yang cukup lama. Wakil kepala daerah dalam hal ini wakil gubernur dibiarkan begitu saja kosong. Wakil gubernur tersebut ialah wakil Gubernur DKI Jakarta dan Riau yang belum terisi selama beberapa bulan. Kasus tersebut terjadi dikarenakan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Riau masih dibiarkan kosong oleh ketua dewan pimpinan daerah. Padahal posisi tersebut bisa sangat membantu Gubernur DKI Jakarta dan Riau dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta dan Provinsi Riau. Begitu juga dengan Wakil Bupati/Walikota, masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki Wakil Kepala Daerah dikarenakan dengan tidak adanya ketegasan aturan dalam pengisian Wakil Kepala Daerah.

Salah satu dampaknya ialah ketika kepala daerah berhalangan maka yang harus menggantikan posisi tersebut adalah wakilnya. Begitu pula dalam aspek lainnya akan sangat berdampak dari jalannya roda pemerintahan daerah. Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya, sehingga wakil kepala daerah harus secepatnya diisi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah memberikan suatu ruang untuk menunda bahkan tidak mengisi jabatan tersebut. Disisi lain ada sebuah implikasi baik secara yuridis bahkan berimplikasi kepada masyarakat karena pada prinsipnya pemerintah selaku wakil rakyat merupakan pelayan, yang jika terjadi kekosongan akan merugikan masyarakat baik dalam pelayanan maupun yang lainnya.

Pengisian jabatan wakil kepada daerah yang kosong Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), dimana selaku Pembina Pemerintahan Daerah maka Kementerian Dalam Negeri selalu menghimbau kepada Kepala Daerah dan DPRD yang daerahnya terjadi kekosongan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan percepatan mengingat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah satu paket dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. KESIMPULAN

Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah memiliki peran penting. Peran besar yang dimiliki kepala daerah akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan daerah berdasarkan prakarsa masing-masing daerah. Artinya, keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh kepala

daerah yang memimpin. Wakil kepala daerah juga punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N. E. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrin, A. (2010). *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.